

lebih memperhatikan kerugian lingkungan laut Cilacap dengan menurunnya produksi Raman perikanan pasca pencemaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdurrahman. 1990.”*Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*”. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman et.al. 2001. “*Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*”.Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Agustina, Rosa. 2013. “*Perbuatan Melawan Hukum*”. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Allaby Michael. 1979.”*Dictionary of the Environment*”. London: The Mac Millan Press, Ltd.

- Arifin, Syamsul. 2011. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Softmedia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. "Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jakarta : Rajawali Press.
- Aspan, Zulkifli. 2012. "Konstitusionalisasi Hak atas Lingkungan dalam Perkembangan HAM di Indonesia". Surabaya :Fakultas Hukum Univ Airlangga.
- Bell Stuart, Dkk. 2006. "Environmental Law", London: Oxford University Press.
- Berry, James. 2002. *The Environmental Law and Compliance Handbook*. McGraw-Hill.
- Churchill R.R, Dkk."The Law of The Sea, Third Edition". United Kingdom:Manchester University Press),1999 "Source of marine pollution: shipping, dumping, sea-bed activities, land-based and atmospheric pollution."
- Coleman, Jules L. 1992. *Risks and Wrongs*. Cambridge University Press.
- Danusaputro, Munadjat. 1986. "Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran". Bandung: Bina Cipta.
- Danusaputro, ST Munadjat. 1981."Hukum Lingkungan-Buku IV: Global". Bandung: Bina Cipta.
- Danusaputro, Munadjat. 1986.*Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V : Sektoral. Bandung : Bina Cipta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erwin, Muhamad. 2011. "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuadi, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Cetakan ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Dj. 2005. *Perlindungan Hukum Hak Penangkapan Ikan Nasional Tradisional Di Kabupaten Majenne*. Makassar.

- Hadjon, Philipus M. 1978. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1995. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Arikha Media Cipta.
- Hanitijo, Soemitro Ronny.1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Alumni.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. *Hukum Tata Lingkungan-Edisi VIII*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harpwood, Vivienne. 2000. *Principles of Tort Law, 4th ed*. Cavendish Publishing Limited.
- Kubasek, Nancy K., dan Gary S. Silverman. 1997. *Environmental Law*. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River.
- Kalalo Flora Priscilla. 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005.*Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mu'adi, Sholih. 2010. "*Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*". Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Muchsin.,2003. "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Narbuko Cholid, Dkk.. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Prodjodikuro, Wirjono. 1990. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur.
- Samekto, FX. 2004. "*Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*" Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Rahmat. 2000. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Bardin.
- Siahaan, N. H. T. 2004. "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*". Jakarta: Erlangga.

- Siahaan, N.H.T. 2009. "*Hukum Lingkungan*". Jakarta: Pancuran Alam.
- Sodikin. 2007. "*Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*". Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 1984. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soekonto. Soerjono. Dkk. 1994. "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, Gatot P. 2004. "*Hukum Lingkungan Indonesia*". Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Alumni, Jakarta
- Sunggono, Bambang. 2006. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutamihardja, RTM. 1978. *Kualitas dan Pencemaran lingkungan*, Bogor: Institute Pertanian Bogor.
- Syarif Laode M, Dkk. 1982. "*Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi dan Studi Kasus)*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Raffensperger, C. dan J.Tickner (eds.). 1999. *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*. Washington D.C: Island Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. "*Ilmu Hukum*". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wijoyo, Suparto. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*. Surabaya: Airlangga University Press.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2.

Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 294.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 27.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang *Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 32.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang *Penanggulangan Keadaan Darurat*.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 5.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 32.

Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, *Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *International Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak 1969).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*.

### **Jurnal**

Ashforf, N.A. 1999. “*A Conceptual Framework for the Use of the Precautionary Principle in Law*”. dalam: C. Raffensperger dan J. Tickner (eds.). *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*. Washington D.C. Island Press.

Bishop, R.C. 2013. *Endangered Species and Uncertainty: The Economics of a sale Minimum Standard*. *American Journal of Agricultural Economics*. dikutip dalam Andri G Wibisana. “Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan”.

Churchill R.R. dan A.V. Lowe. *The Law of The Sea, Third Edition-Source of marine pollution: shipping, dumping, sea-bed activities, land-based and atmospheric pollution*.

Fitriyeni, Cut Era. 2010. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (The Environmental Dispute Settlement Through Litigation)*. KANUN No. 52 Edisi Desember.

Hartanto, Heri dan Anugrah Adiastruti. 2017. *Mekanisme Penentuan Nilai Ganti Rugi terhadap Kerusakan Lingkungan*. *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*. Vol. 3, No. 2. Juli – Desember.

Marmoto, Victor O. 2015. *Perlindungan Hukum Nelayan di Wilayah Tangkapan Ikan*. *Lex Ex Societatis*. Volume III/No.5/Juni/2015.

Sands, Philippe Richard Tarasofsky, dan Marey Wless. *Documents in International Environmental Law IIA-IIB*. United Kingdom: Manchester University.

Quina, Margaretha dkk. 2015. *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Juli 2015. Vol 2 Issue 1. Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law (ICEL).

Wibisana, Andri G. 2013. “*Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan*”. dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (*forthcoming*).

### Sumber Lain-lain

Basbeth, Ferryal. *Proximate Cause dan “but for test sebagai Sebab Kematian Dalam Sertifikat Kematian*. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences. Volume 2 Nomor 1. Ferbruari 2012. Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs/article/view/3250> tanggal 24 November 2018 pukul 22.00.

Damanti, Rennisca Ray dan Mareta Nirmalanti (ed.). 2014. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka*. Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber: [http://sstatistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/90/Kelautan -dan-Perikanan-Dalam-Angka-Tahun-2014/?category\\_id=3](http://sstatistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/90/Kelautan-dan-Perikanan-Dalam-Angka-Tahun-2014/?category_id=3).

Dessy Andrea Muslim, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri*, [www.eprints.ac.id](http://www.eprints.ac.id), 2010, di akses pada 17 Agustus 2018, pukul 08.00 WIB.

\_\_\_\_\_ [http://kbr.id/nusantara/062015/hnsi\\_cilacap\\_sejak\\_tahun\\_2000\\_ada\\_12\\_insiden\\_minyak\\_tumpah/71599.html](http://kbr.id/nusantara/062015/hnsi_cilacap_sejak_tahun_2000_ada_12_insiden_minyak_tumpah/71599.html).

\_\_\_\_\_. <https://news.detik.com/berita/2924096/warga-berebut-tumpahan-minyak-di-perairan-teluk-penyu-cilacap?n991101605>.

\_\_\_\_\_. <https://radarbanyumas.co.id/hasil-tangkapan-nelayan-nol-rupiah/>

\_\_\_\_\_. <https://radarbanyumas.co.id/pertamina-bisa-lepas-tangan-klaim-kebocoran-dari-kapal-martha-petrol/>,

\_\_\_\_\_. <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.

Kuncowati. *Pengaruh Pencemaran Minyak di Laut Terhadap Ekosistem Laut*, [http://hangtuah.ac.id/pdkk/images/stories/2\\_jurnal%201-pdp.pdf](http://hangtuah.ac.id/pdkk/images/stories/2_jurnal%201-pdp.pdf).

Muslim, Dessy Andrea. 2010. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri*. [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id).

Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis” diakses dari <https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/pranata-hukum-sebuah-telaah-sosiologis/> pada tanggal 3 Juli 2015 pada pukul 14.21 WIB.

- Diniyati, Hilda Hilmiah. 2013. "*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id).